

Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lampung Barat dalam perspektif Ekonomi Islam

Arief Habiburohman, Juhainah, Lisa Efrina
Universitas Islam An Nur Lampung
oppouswatun99@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dengan menganalisis pengaruh PD, JP, IPM serta bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi diperoleh $0.352 > 0.05$

Maka menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. atau nilai signifikan ($0.042 < 0.05$). Pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran dikarenakan tidak terjadi peningkatan PDRB. Islam memandang Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya PDRB, penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Keywords : *Pemekaran, Pertumbuhan Ekonomi*

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Pendahuluan

Pemekaran wilayah, pemekaran berasal dari kata “MEKAR” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak. Sedangkan Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Jadi pemekaran wilayah adalah suatu proses pembagian wilayah atau daerah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. (AMRONI, 2019)

Pemekaran wilayah juga erat kaitannya dengan pembangunan, dalam Islam pembangunan disebutkan sebagai “keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya”. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan QS.Ad- Dhuha 93:4 yang artinya :“Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)” Pembangunan pada prinsipnya memiliki arti luas, secara sederhana pembangunan adalah perubahan kearah lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dilaksanakannya proses pembangunan tidak lain karena ada perasaan tidak puas dari individu maupun masyarakat dari keadaan yang dialami saat ini,(Widada et al., 2019)

Pertumbuhan ekonomi daerah salahsatunya dapat dicerminkan dari perubahan PDRB, pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan IPM disuatu daerah dalam periode tertentu. Tinginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat berakibat pada berkurangnya luas wilayah, termasuk potensi pendapatan, namun berdasarkan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Barat, kondisi perekonomian Tahun 2016. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi berada 5%, jika dilihat selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat cenderung mengalami naik turun setelah mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah telah terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat

sebagai daerah hasil pemekaran. Lepasnya Pesisir Barat dari pemerintahan induknya yang membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya mengakibatkan terjadinya perubahan sumber-sumber daya dalam perekonomian wilayah, perubahan jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Pasca runtuhnya rezim Orde baru yang 32 tahun lamanya berkuasa menandai babak baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula pola hubungan pemerintah pusat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.(Nizar et al., 2018) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, dan kota sebagai suatu wilayah. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara daerah provinsi, kabupaten, dan kota pemekaran, di mana ada daerah yang penduduk/kegiatan terkonsentrasi pada suatu tempat dan yang kurang terkonsentrasi.(AMRONI, 2019) Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al- quran dan Sunnah. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran. b. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, IPM sebelum dan sesudah pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. c. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Landasan Teori

Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. (Triakurniasih et al., 2019) Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-

Quran surat Al- Maidah, Ayat 2 yang berbunyi : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya Selain itu juga, tidak terlepas dari Kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah adalah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian. Partisipasi aktif dari Masyarakat akan mempercepat pembangunan suatu wilayah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap wilayah tersebut yang didukung oleh kinerja ekonomi yang lebih baik. Dalam hal ini Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Ayat 2.

Selain itu juga, tidak terlepas dari Kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman Allah SWT QS. A-Maidah (49 Pengertian otonomi menurut UU No. 32 tahun 2004 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi Mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak dan wewenang. Ramirez berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia human development.(Setyanto & Budiharsono, 2018)

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran daerah dapat dilihat dari pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad menyatakan bahwa Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari nilai PDRB yang merupakan nilai total pengeluaran setiap unit ekonomi dimana salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian yang akan memberi manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.(Setyanto & Budiharsono, 2018)

Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Namun diharapkan kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT seperti dijelaskan pada firman Allah SWT QS. A-Maidah yang Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu kebijakan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan demikian masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam suatu kepemimpinan dalam Islam. Dengan adanya pemekaran tersebut, maka pemerintah dengan mudah untuk menangani masalah masyarakat terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu alat pengukur prestasi dari Suatu perkembangan perekonomian. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya

akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau sudut pandang dalam memilih suatu opini. Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua dengan menggunakan analisis t-test equal mean.

Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan gambaran tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikanya. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala- gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Zuriah, 2007) Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal- hal yang berkenan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak- dampak pemekaran wilayah meliputi hal- hal sebagai berikut: 1. Dampak Sosio Kultural. Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru.

Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) di sebelah utara, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan, Kabupaten Pesisir Barat di sebelah barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan kabupaten Tanggamus di sebelah timur. Berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2023 s/d 2024 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar minus 33,16%. Pemekaran wilayah baru-baru ini terjadi di Provinsi Lampung yaitu di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat dibagian ujung Barat dari Provinsi Lampung.

Pembentukan Kabupaten Lampung Barat sudah dimulai sejak tahun 1997. Kabupaten Lampung Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah induk dan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah hasil pemekaran. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah Kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231 Negara Republik Indonesia Nomor 5364) yang disahkan pada tanggal 25 Oktober dan Tambahan 2012.

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomis suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang diukur dengan nilai PDRB/kapita. Daerah yang lebih sejahtera umumnya memiliki PDRB/kapita yang lebih tinggi. PDRB/kapita dihitung dengan cara membagikan nilai PDRB daerah dengan jumlah

penduduk di daerah tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi. Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana amanah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Implementasi pemekaran wilayah sebagai suatu bentuk percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak selalu memberikan dampak positif tetapi tidak juga negatif terhadap perekonomian wilayah.

pemekaran wilayah memiliki “wajah ganda”, yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Manfaat dan kerugiannya sangat tergantung pada sudut pandang siapa, baik pemerintah daerah ataupun pusat. Jika dari sudut pandang daerah, pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi perkembangan percepatan pembangunan. Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah provinsi Lampung dan mempunyai Garis pantai sepanjang 260 km, Kabupaten Lampung Barat memiliki Luas wilayah $\pm 3368,14 \text{ km}^2$. Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat $40,47''$, $16''$ – $50.56''$, $42''$ lintang selatan dan $1030,35''$, $08''$ $1040,33''$, $51''$ Bujur Timur. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Lampung Barat berkisar antara 2500-3000 milimeter setahun. Secara topografi, Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu: (1) Topografi Dataran Rendah memiliki ketinggian 0 – 600 meter dari permukaan laut; (2) Topografi Perbukitan mempunyai ketinggian 600 – 1000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di kecamatan Balik Bukit dan Sumber jaya; (3) Topografi Pegunungan mempunyai ketinggian 1000 – 2000 meter dari permukaan laut. Sebagian kecamatan Balik Bukit dan Sumber jaya, serta sebagian besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

Pengeluaran daerah Kabupaten Lampung Barat setelah mengalami pemekaran wilayah menurun drastis pada tahun dilakukannya pemekaran wilayah yaitu dari 4.907.703,07 (juta rupiah) menjadi 3.698.307,30 (juta rupiah). Kemudian meningkat kembalipada tahun 2013 dengan pengeluaran sebesar 3.845.234,99. Namun, untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji beda paired t-test nilai signifikansi $0.352 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah.
2. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial (Uji T) menunjukkan bahwa variabel pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t-statistik dengan t-tabel yang dilakukan menggunakan SPSS.17 yaitu t- tabel sebesar 2.77645, sedangkan t-statistik variabel Pengeluaran Daerah = (1.432), Jumlah Penduduk = 0.028, dan IPM = (-0.974). Berdasarkan Gambar tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat selama periode 2013 s/d 2019 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,57%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun setelah dilakukannya pemisahan Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebesar minus 33,16%.

3. Ekonomi Islam memandang

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat belum optimal karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih belum diiringi dengan meningkatnya penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan sehingga dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sedangkan, Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi yang optimal itu sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras agama, dan bangsa serta mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi). Konsep dari pembangunan manusia seutuhnya adalah konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual. Bahkan disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga manusia dapat dikatakan sebagai modal utama

daya saingnasional. Diketahui pencapaian IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 s/d 2024 cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. UNDP menyatakan bahwa IP dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu low (IPM < 50), lower- medium (50 – 65,99), upper-medium (IPM 66-79,99) dan high (IPM keatas). Berdasarkan data IPM Kabupaten Lampung Barat selama tahunv 2017 s/d 2023 dihasilkan rata-rata IPM sebesar 63,16 sehingga IPM Kabupaten Lampung Barat berada pada kategori IPM Lower- medium.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama penelitian ini berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Islam An Nur Lampung atas fasilitas dan data yang telah diberikan. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, jurnal ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- AMRONI, Y. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. *Ayan*, 8(2), 2019. [https://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.neps-data.de/Portals/0/Working Papers/WP_XLV.pdf%0Ahttp://www2.psy](https://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.neps-data.de/Portals/0/Working%20Papers/WP_XLV.pdf%0Ahttp://www2.psy)
- Nizar, M., Syechalad, M. N., & Gunawan, E. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(November), 134–150.
- Setyanto, K. A., & Budiharsono, S. (2018). Analisis Dampak Peningkatan Alokasi Anggaran Pada. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(April), 33–45.
- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.76>
- Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(2), 1–15. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095
- AMRONI, Y. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. *Ayan*, 8(2), 2019. https://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.neps-

- data.de/Portals/0/Working Papers/WP_XLV.pdf%0Ahttp://www2.psy
- Nizar, M., Syechalad, M. N., & Gunawan, E. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(November), 134–150.
- Setyanto, K. A., & Budiharsono, S. (2018). Analisis Dampak Peningkatan Alokasi Anggaran Pada. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(April), 33–45.
- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.76>
- Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(2), 1–15. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095